

LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI

KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM LKBN ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, KOMISI INFORMASI PUSAT, LEMBAGA SENSOR FILM (LSF), BADAN KEAMANAN LAUT RI, DAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)

Rapat ke : 16 (enam belas) Tahun Sidang : 2017-2018

Masa Persidangan : I\

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Pengamanan Data Pribadi

Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Direktur Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat

(Elsam), dan Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum UNPAD

Hari, Tanggal : Selasa, 10 April 2018

Pukul : 12.00 WIB (setelah Rapat Paripurna DPR RI)

Sifat Rapat : Terbuka

Pimpinan Rapat : Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P., Wakil Ketua Komisi I

DPR RI

Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si., Kabagset. Komisi I DPR RI

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270

Acara : 1. Pandangan dan masukan terhadap registrasi data pelanggan seluler

2. Saran dan masukan terhadap pengamanan data pribadi pelanggan

(aspek regulasi, roadmap, sistem/infrastruktur, dan lain-lain)

Pemetaan pentingnya pengamanan data pribadi terkait e-commerce
Potensi ancaman penyalahgunaan data pribadi dan antisipasinya

Hadir : 1. ... orang dari 32 Anggota Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I

DPR RI

2. a. Ketua Umum Mastel, Kristiono;

- b. Direktur Eksekutif Elsam diwakili oleh Deputi Direktur Riset, Wahyudi Djafar;
- c. Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum UNPAD, Dr. Sinta Dewi, S.H., LLM:

beserta jajarannya.

I. <u>PENDAHULUAN</u>

- 1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat pada pukul 13.27 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- RDPU Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR RI dengan Ketua Umum Mastel, Direktur Eksekutif Elsam, dan Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum UNPAD pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) Asril Hamzah Tanjung, S.I.P.

II. CATATAN

Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam), dan Cyber Law Center Unpad terkait dengan pentingnya pengamanan data pribadi, Panja Pengamanan Data Pribadi Komisi I DPR RI memberikan catatan, antara lain:

- 1. Indonesia perlu segera memiliki Undang-undang Perlindungan Data Pribadi sebagai payung hukum dalam memberikan keamanan masyarakat di ruang digital, dengan pertimbangan:
 - a. Sebagian besar negara telah memiliki undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi
 - b. Adanya EU General Data Protection Regulation (diimplementasikan Mei 2018), sehingga memudahkan masyarakat untuk bekerjasama dengan masyarakat EU.
 - c. Menghadapi ekonomi digital 2020 dan Pemilihan Umum 2019.
- 2. RUU Perlindungan Data Pribadi harus mampu mengatur pengamanan data pribadi secara komprehensif yang mencakup semua data pribadi di semua sektor.
- Dalam mengatur tata cara registrasi kartu jasa telekomunikasi, perlu diatur kebijakan setingkat undang-undang mengacu pada pengalaman negara lain yang sudah menerapkan undang-undang tersebut namun dengan penyesuaian hukum tata negara Indonesia.

III. <u>PENUTUP</u>

Rapat ditutup pukul 16.33 WIB.

Jakarta, 10 April 2018 **KETUA RAPAT,**

TTD.

MAYJEN TNI (PURN) ASRIL HAMZAH TANJUNG, S.I.P. A-340